

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan suatu unit organisasi pada lingkungan badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia (Batlibang SDM) Kemkominfo.

Dalam hal ini peraturan menteri nomor 6 tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018, tentang suatu organisasi dan tata kerja kementerian komunikasi dan informatika, pada pasal 696 pusdiklat adalah: “Melaksanakan suatu pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional” pada pasal 697:

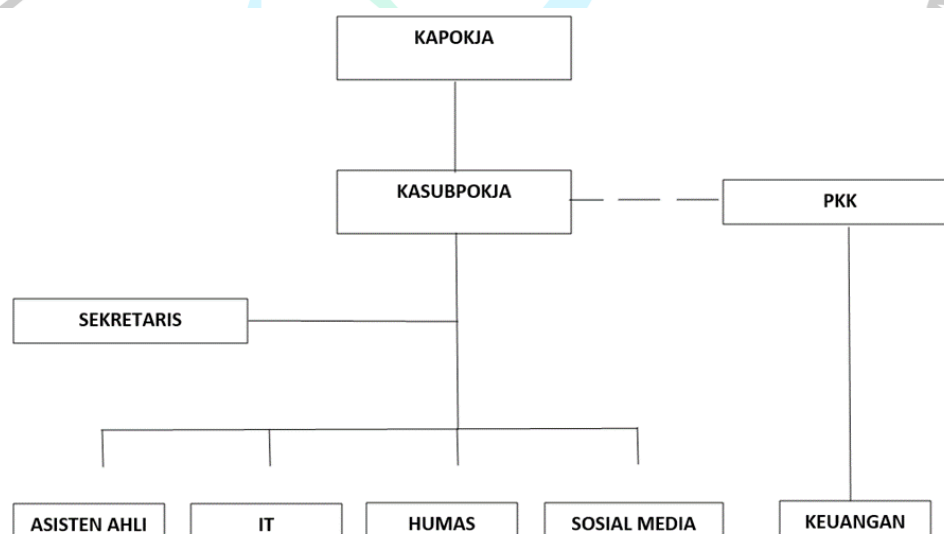
1. Fungsi pusdiklat adalah penyusunan kebijakan teknis pada bidang Pendidikan
2. Serta pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional: pelaksanaan Pendidikan serta pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional:
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional:
4. Pelaksanaan administrasi pusat.

Pusdiklat Kominfo pertama kali berdiri pada tahun 1976 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Penerangan RI pada Tanggal 1 Januari 1976. Pada tahun 2001 Pusdiklat Kominfo berganti nama menjadi Balai Diklat Lembaga Informasi Nasional pada tanggal 1 Januari 2001. Pada tahun 2005 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tanggal 28 Oktober 2010, Sesuai Peraturan

Menteri Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 18 Januari 2016, yang berkaitan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pusdiklat berubah nama menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pusdiklat Pertama kali memperoleh akreditasi pendelegasian kewenangan pelatihan fungsional pada Tanggal 10 Juli 2019. Hal tersebut merupakan hasil suatu penilaian akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhadap Lembaga Pelatihan pada Tahun 2019, Pusdiklat. Obyek pelatihan yang menjadi penilaian tim asesor dari LAN yaitu Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Surat Keputusan (SK) dari LAN yaitu diberikan pada tanggal 25 November 2019. Pada Tahun 2021 terjadi perubahan SOTK Pusdiklat, sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2021 tentang SOTK, Pusdiklat mengalami suatu perubahan Struktur.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2 2 Struktur Organisasi

Sumber: (Pusdiklat.Kominfo , 2022)

1. PKK

Tugas pkk sendiri yaitu melaksanakan, merencanakan, serta membina pelaksanaan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memberikan laporan terkait dengan tugas kepada ketua program kerja. Mengadakan suatu monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program-program. Fungsinya sendiri yaitu sebagai, motivator, penggerak serta melaksanakan program. Fasilitator, perencana, pelaksana serta Pembina dan pembimbing.

2. Sekretaris

Dalam hal ini tugas dari sekretaris yaitu membantu dalam melaksanakan suatu rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

3. Asisten Ahli

Dalam hal ini tugas dari asisten ahli yaitu membantu tenaga ahli dalam pekerjaan teknis dalam hal pengumpulan data, analisis maupun evaluasi dan pelaporannya.

4. IT

Tugas dari IT sendiri yaitu teknisi dari sebuah organisasi ataupun perusahaan yang bertanggung jawab dalam instalasi, evaluasi serta yang berkaitan dengan peningkatan tiga objek utama seperti komputer, *software*, maupun pengembangan *system* jaringan ataupun *network system*.

5. Humas

Dalam hal ini humas bertugas dalam hal menyampaikan informasi yang penting mengenai suatu organisasi ataupun perusahaan kepada publik. Dengan tujuan publik memahami terkait dengan sudut pandang dari perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan isu atau masalah tertentu. Humas juga bertugas untuk mencari segala bentuk opini yang berkaitan dengan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam hal ini dengan mengetahui opini publik humas dapat memberikan masukan kepada organisasi yang berhubungan dengan kemauan, masukan

kepada publik. Sehingga organisasi tidak keliru dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan organisasi.

6. Sosial media dan Publikasi

Dalam hal ini yaitu mengelola media sosial seperti Instagram, facebook, twitter. Melakukan penulisan kegiatan yang berkaitan dengan program pelatihan digital leadership academy. Membuat *design* yang berkaitan dengan poster, membuat plan terkait dengan postingan sosial media. Praktikan tergabung dalam divisi ini untuk membantu perencanaan konten dari digital leadership academy. Praktikan dalam menjalankan pekerjaan dibawah bimbingan tim sosial media maupun asisten ahli yang bernama Ibu Sari Oktaviani dalam membuat serta merencanakan suatu konten yang akan dipublikasikan.

7. Keuangan

Keuangan dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam memantau uang yang masuk maupun keluar dari suatu perusahaan. Mereka serta menganalisis suatu transaksi yang berkaitan dengan keuangan dan memberikan informasi keuangan kepada atasan maupun departemen lain. Keuangan pada dasarnya bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan ke pihak eksternal seperti dalam bentuk pelaporan keuangan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Digital leadership Academy merupakan suatu pola kepemimpinan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi secara optimal dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih cepat. Dalam pelatihan ini para pemimpin digital dapat mengasah suatu skill digital untuk mendukung suatu pekerjaan dalam pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini digital leadership academy bekerja sama dengan beberapa mitra kampus luar negeri seperti Cambridge, NUS, Tsing Hua, Cornell. Dalam setiap kampus tersebut dapat menggandeng serta mengajak sekitar 35 pimpinan pada setiap mitra kampusnya untuk mengikuti pelatihan digital leadership academy.

Digital Leadership Academy merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kapasitas para pemimpin agar mampu:

1. Merubah suatu pola pikir serta mendorong adanya suatu penyamaan persepsi untuk terwujudnya satu pemahaman yang sama untuk mampu

berkolaborasi secara makro yang bertujuan agar terjadi sinergitas antar sector

2. Meningkatkan suatu kompetensi para pembuat kebijakan untuk menciptakan suatu model bisnis baru dalam menuju transformasi digital.
3. Merumuskan suatu kebijakan yang dapat mendorong suatu pertumbuhan ekonomi maupun industry digital untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dari masyarakat
4. Mendorong dari adanya peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia
5. Menginisiasi serta mendorong perubahan menuju transformasi digital

Dalam hal ini sasaran dari digital leadership academy merupakan para pemimpin untuk menginisiasi serta mendorong suatu perubahan menuju transformasi digital dengan upaya merumuskan suatu kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergi dalam meningkatkan suatu daya saing ekonomi digital Indonesia. Digital leadership academy memiliki persyaratan dalam pelatihan yaitu sebagai berikut:

1. WNI dengan dibuktikan dengan kepemilikan KTP/KK
2. Usia maksimal pada saat mendaftar berusia 50 tahun
3. Untuk ASN dan Pemerintah minimal setara dengan JPT Pratama (Eselon II)
4. Untuk Anggota DPR menduduki jabatan ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi
5. Untuk Akademisi minimal menduduki jabatan Rektor, Dekan, Ketua, Direktur, Wakil
6. Untuk Swasta yaitu minimal menduduki posisi Chief-level
7. Pendidikan yaitu minimal S1 dari semua jurusan
8. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yaitu minimal pasif
9. Memiliki skor IELTS minimal 6,5 dan TOEFL 550 dengan dibuktikan sertifikat yaitu menunjukkan kemampuan Bahasa Inggris tingkat fasih
10. Menuliskan essay (Statement of Purpose) yang menjelaskan minat, motivasi dan tujuan dalam mengikuti pelatihan dengan kurang lebih 600 sampai 700 kata.

Tabel 2. 1Skema Akademi, Pelaksana, Model Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, dan output serta Jam Pelatihan

Sumber: (Juknis Pelatihan Digital Leadership Academy, 2022)



No	Skema Akademi	Pelaksana	Model Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Digital Transformation: Smart City</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	<i>Batch 1= Juli-Agustus</i> <i>Batch 2= Agustus-September</i> <i>Batch 3 = September-Oktober</i>
2.	<i>Digital Transformation: Digital Business</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Onlinedan/atau Hybrid</i>	Agustus-Oktober
3.	<i>Delivering Public Service: efficiency, equity, and quality</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober
4.	<i>Innovation and Leadership in Digital Transformation</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober
5.	<i>Digital Leadership: Transformation in a VUCA World</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober
6.	<i>Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober
7.	<i>Digital Trust and Cybersecurity - the Essential Foundation for Transformation</i>	Mitra Balitbang SDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober
8.	<i>Digital Transformation Strategy</i>	Mitra BalitbangSDM	<i>Online</i>	Juli-Oktober

Dalam tabel di atas dapat dilihat ada beberapa skema akademi dalam pelatihan digital leadership academy seperti *digital transformasi smart city, digital transformation: digital business, Delivering Public Service: efficiency, equity, and quality, innovation and leadership in digital transformation, digital leadership: transformation in a VUCA World, Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future, Digital trust and Cybersecurity – the Essential Foundation for*

Transformation, digital transformation strategy. Dalam pelatihan digital leadership academy pelaksanaannya melalui *online* ataupun *hybrid*. Tema dalam pelatihan digital leadership academy diantara adalah Transformasi Digital, Aparatur di Era Digital, Regulasi pendukung Transformasi Digital, Kebijakan dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam Era Digital, Kebijakan Penyusunan *Policy brief* dan rencana aksi, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Era Digital, Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digital, Internalisasi Pancasila dalam Transformasi Digital, Keamanan Siber di Era Digital.

Output dari digital leadership academy yaitu rancangan *policy brief* dalam kebijakan pemerintah yang berbentuk rencana aksi. Dalam digital transformation dan digital bussines terdapat interpreter serta peserta akan mendapatkan (*Certificate of Completion*) dari Balitbang SDM dan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas penyelesaian pelatihan.